

ABSTRAK

Nama : Andri Nurjaman, NIM : 2200120003, Sejarah Peradaban Islam, Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Nahdlatul Ulama (NU) berdiri pada tahun 1926. Pada tahun 1937 NU bergabung pada Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI). MIAI ini dibubarkan dan digantikan oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) pada tahun 1945. Pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan NU berdiri sebagai partai tersendiri. Sejak tahun 1950 sampai 1959 Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, namun pada tanggal 05 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang menggantikan demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin. NU adalah satu-satunya partai besar yang mewakili umat Islam yang bertahan pada masa demokrasi terpimpin tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dengan menggunakan tahapan-tahapan sejarah yang meliputi Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Teori yang digunakan adalah teori Heurmenetika yang dipopulerkan oleh Paul Ricoeur. Teori ini menyatakan bahwa teks adalah bersifat otonom, ia tidak bergantung pada maksud pengarang, pada situasi historis karya atau buku dimana teks itu berada. Karena teks merupakan penghubung bahasa isyarat dan simbol-simbol yang dapat membatasi ruang lingkup heurmenetika, karena budaya oral (ucapan) dapat dipersempit atau diperluas, maka jika heurmenetika diterapkan pada suatu teks, maka sifat heurmenetika akan berubah sesuai dengan keadaan teks itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut : (1) konsep demokrasi terpimpin yang dimulai sejak tahun 1965 adalah suatu antitesa dari sistem demokrasi demokrasi parlementer atau liberal yang condong ke Barat. Kehidupan politik demokrasi terpimpin adalah semua kekuasaan berpusat pada Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan pemerintahan. (2) NU langsung merespon langkah Presiden Soekarno dengan demokrasi terpinpinnya, akhirnya NU menerima konsep demokrasi terpimpin tersebut berlandaskan tiga alasan, yaitu *pertama* alasan teologis yang bersumber pada teori fiqh dan ushul fiiqh, *kedua* alasan sosiologis yaitu kondisi yang mengahuskan NU menerima karena menghadapi bahaya PKI dan *ketiga* alasan politis yaitu karena NU mempertahankan jabatan dipemerintahan sejak era demokrasi parlementer. (3) Adapun dukungan NU terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno masa demokrasi terpimpin adalah *pertama* dukungan moral seperti diberi gelar *Waliyul Amri Addaruri Bissyaukati* dan gelar *Doktor Honaris Causa*. *Kedua* dukungan ide dari tiga serangkai tokoh NU yaitu KH Wahab Chasbullah, KH Idham Chalid dan KH Saifuddin Zuhri yang berusaha menjembatani antara Islam dan demokrasi terpimpin, dan ternyata konsep demokrasi terpimpin sesuai dengan ajaran Islam. *Ketiga* dukungan politis dengan banyaknya kader NU yang berkiprah pada jabatan-jabatan strategis dipemerintahan. Sebagai *closing statemen* bahwa hakikat dukungan NU tersebut adalah untuk menyelamatkan Islam dan para pengikutnya dari berbagai macam bahaya.

Kata Kunci: Dukungan NU, Presiden Soekarno, Demokrasi Terpimpin.